



KLIPING

MASS MEDIA

FAJAR TRIBUN SEPUTAR INDONESIA BISNIS INDONESIA
 KOMPAS REPUBLIKA UJUNG Pandang EKSPRES KORAN TEMPO

TANGGAL :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																											✓			

BULAN :

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
	✓										

TAHUN

2012

HAL

1-11

Bank Sulselbar Terindikasi Boros

MAKASSAR – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Makassar menemukan sebanyak 17 dugaan terjadinya pemborosan keuangan negara yang dikelola di Bank Sulselbar. Temuan tersebut berdasarkan audit terhadap bank daerah yang kepemilikan sahamnya didominasi Pemprov Sulsel tersebut sepanjang 2011 lalu. Namun, BPK enggan membeberkan mengenai jumlah indikasi pemborosan keuangan di bank peme-

rintah itu. “Tadi ada 17 permasalahan yang kami sampaikan. Saya takut sebutkan angkanya karena tidak hapal,” kata Kepala BPK Perwakilan Makassar Cornell Syarief kemarin.

Hal ini dilontarkan Cornell usai menyerahkan hasil audit BPK kepada Komisaris PT Bank Sulselbar A Muallim, yang juga Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel di Kantor BPK Jalan AP Pettarani.

Ke Hal 11))

Bank Sulselbar Terindikasi Boros

((Dari Hal 1

Dalam penyerahan hasil laporan audit tersebut, manajemen Bank Sulselbar diberikan waktu selama sebulan untuk melakukan laporan perbaikan.

Sebanyak 17 temuan tersebut, pemborosan yang terjadi di antaranya pembiayaan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) yang dinilai membebani keuangan daerah. Selain itu, terdapat pula pembayaran suku bunga yang cukup tinggi dan PPH dari yang ditetapkan pengelola Bank Sulselbar.

Cornell menegaskan, audit yang dilakukan timnya tidak menemukan adanya indikasi tindakan korupsi. Namun, dia berjanji akan melakukan audit mendalam terhadap 17 temuan tim audit. “Tidak ada yang kita

temukan sifatnya penyelewengan. Karena yang kita audit itu sistem operasionalnya. Beberapa temuan ini harus segera ditindaklanjuti oleh Bank Sulselbar,” ungkapnya.

Saat ditemui di Kantor BPK, Muallim terkesan menghindari wartawan. Begitu pun dengan telepon dan pesan singkat yang dikirimkan, tak kunjung dibalas.

Sebelumnya, BPK juga menemukan adanya penyaluran kredit kredit ke kabupaten/kota yang terindikasi merugikan keuangan negara. Jumlah kerugian ditaksir mencapai Rp329 miliar. Namun, Muallim berkilah, temuan tersebut sudah tidak bermasalah lagi dan menganggapnya hanya sebagai kesalahan administrasi.

● wahyudi